

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Salafi

##### 1. Makna Salafi

Gerakan Islam di Indonesia mempunyai tujuan yang bervariasi. Meskipun semuanya berbicara atas nama Islam, masing-masing gerakan memiliki karakteristik dan penekanan tujuan yang berbeda. Ada yang ingin menegakkan syari'at Islam diformalkan untuk menjadi sumber perundangan di Indonesia dan ada pula gerakan yang bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam. Hakekatnya sama-sama ingin menerapkan syari'at Islam, tetapi setiap gerakan mempunyai orientasi dan cara yang berbeda dalam merealisasikan harapannya. Selain itu, karakter kelompok-kelompok tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu, penulisan skripsi mencoba untuk mempertegas makna salafi dan mengidentifikasi karakteristik kaum salafi.

Salafi, secara etimologis (bahasa) berasal dari bahasa Arab yaitu '*salaf*' yang berarti apa yang telah berlalu dan mendahului. Sebagaimana ungkapan *as-salaf* yang artinya suatu kaum yang mendahului dalam perjalanan. Makna *salaf* menurut Al-Atsari adalah orang yang mendahului, baik itu nenek moyang maupun kerabat keluarga atau siapapun.<sup>1</sup> Adapun secara terminologis (istilah), kata *salaf*, menurut para ulama adalah sekitar

---

<sup>1</sup>Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, *Intisari Aqidah Ahl al-Sunnah wal Jama'ah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), 39.

sahabat, *tabi'in*, dan *tabi' al-tabi'in* yang hidup di masa tiga abad pertama hijriah. Mereka adalah golongan yang dimuliakan dari kalangan para Imam. Mereka diakui keimanan, kebaikan, pemahaman keagamaannya, dan keteguhannya dalam menjadikan Sunnah sebagai pedoman hidup serta menjauhi *bid'ah*. Umat Islam sepakat dengan keagungan dan kedudukan mereka yang terhormat dalam agama. Hal itu disandarkan pada sabda Nabi:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

“Sebaik-baik manusia adalah (orang yang hidup) pada masa-ku ini (yaitu generasi sahabat), kemudian yang sesudahnya (generasi *tabi'in*), kemudian yang sesudahnya (generasi *tabi' al-tabi'in*)” (H.R: Bukhari).<sup>2</sup>

Hal yang tidak diragukan lagi bahwa sebab kebaikan dan keutamaan yang diberikan kepada golongan umat Islam tersebut karena mereka bagaikan lingkaran mata rantai pertama terdekat yang menyambungkan kepada risalah Rasulullah. Generasi pertama merupakan kawanan (garda) terdepan yang menerima pengajaran tentang akidah dan dasar-dasar agama Islam secara langsung dari Rasulullah. Generasi kedua disebut dengan *tabi'in* (pengikut) yang terlimpahi cahaya kenabian dengan mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah dan mengikuti petunjuk mereka. Mereka memperoleh cahaya dari generasi pertama yang telah bertatap muka langsung dengan Rasulullah dan duduk dalam majelis Rasulullah serta adanya pengaruh dari nasihat dan wasiat Rasulullah. Kelompok yang ketiga dinamakan dengan *tabi' al-tabi'in*. Kelompok ini merupakan

---

<sup>2</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Hadis Shahih Jilid 1* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 9.

penutup dari generasi yang lurus pemikirannya dan murni jaran Islamnya dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan.<sup>3</sup> Tiga generasi inilah yang kemudian disebut *salaf as-salih*.

Tiga generasi ini merupakan model sebuah komunitas yang bersandar pada kebenaran wahyu. Karena itu, tiga generasi ini adalah orang-orang yang lebih unggul dan mengerti di dalam memahami makna dan maksud yang terkandung di dalam al-Qur'an. Mereka adalah orang yang lebih dahulu menerima dan memahami dari Sunnah Rasulullah. Mereka termasuk orang yang paling jujur dan teguh dalam beragama, lebih suci fitrahnya, dan jauh dari upaya penyelewengan dan bid'ah. Maka, tiga generasi inilah merupakan orang-orang yang lebih dapat dipercaya dan dapat selamat dengan mengikutinya.<sup>4</sup>

Namun, pembatasan istilah *salaf* berdasarkan waktu atau masa bukan merupakan syarat dalam hal ini. Syaratnya adalah kesesuaian pandangannya dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan pemahaman *salaf*, baik dalam masalah akidah, hukum syar'i, maupun akhlak. Sehingga siapapun yang pemahamannya sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah walaupun berjauhan tempat dan masanya, maka dia adalah pengikut *salaf*. Sebaliknya siapa yang tidak sesuai, walaupun dia hidup sezaman, maka dia bukan tergolong *salaf*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Salafi: Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 3.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>5</sup>Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, *Intisari Aqidah...*, 41.

Generasi *salaf* adalah generasi yang lebih pantas diikuti daripada generasi yang lain, dikarenakan kejujuran mereka dalam keimanan dan keikhlasan dalam beribadah. Mereka adalah generasi penjaga kemurnian akidah, pelindung syari'ah dan pelaksananya baik dengan perkataan maupun perbuatan.<sup>6</sup> Sebagaimana sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقُنَّ أُمَّنِي عَلِي  
بَارِسُؤْلٍ ثَلَاثٍ وَسَعِيْرٍ فِرْقَةٌ فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَعُوْنٌ فِي النَّارِ قِيْلَ : مَنْ هُمْ  
اللَّهُ، قَالَ : أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

“Rasulullah SAW bersabda: Demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan, satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka, seorang sahabat bertanya “ siapakah mereka yang masuk surga itu, ya Rasulullah? “Rasulullah menjawab, “Mereka itu adalah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (ASWAJA)” (H.R: Imam Thabrani).<sup>7</sup>

Oleh karena itu, siapapun yang mengikuti jejak *salaf al-salih* dan menjalankan ketentuan agama sesuai *manhaj* (cara dan sikap beragama) mereka di semua zaman dinamakan *salafi*. Kata *salafiyyah* menjadi sebutan pada cara penerapan *salaf al-salih* dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan demikian, pengertian *salafiyyah* itu ditujukan kepada orang-orang yang berpegang teguh sepenuhnya terhadap al-Qur'an dan al-Hadith dengan pemahaman *salaf*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Slamet Muliono R, “Politik dalam Perspektif Kaum Salafi”, *Jurnal Review Politik: Kajian Islam dan Politik*, Vol.01, No.02 (Agustus 2011), 148.

<sup>7</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Hadis Shahih...*, 452.

<sup>8</sup>Slamet Muliono R, “Politik dalam Perspektif Kaum Salafi”..., 149.

## 2. Akar Munculnya Kaum Salafi

Salah satu aktor kebangkitan Islam di Timur Tengah adalah kaum salafi, karena mereka pada hakekatnya tidak pernah menjadi satu jamaah atau kelompok saja. Tidak pernah ada institusi formal yang menjadi tempat bernaung kaum salafi. Karena salafi merupakan ajaran yang murni dan bebas dari penambahan, pengurangan, atau perubahan. Salafi bukanlah partai politik dan mazhab baru. Namun, dakwah salafi merupakan Islam dalam totalitasnya, yang menuntun semua manusia. Salafi merupakan metode (*manhaj*) yang lengkap dan sempurna dalam memahami Islam dan melaksanakan tindakan sesuai ajaran-ajarannya.<sup>9</sup>

Gerakan kaum salafi merupakan gerakan pemurnian terhadap ajaran agama yang telah mengalami banyak penyimpangan. Penyimpangan ini berupa penambahan dan pengurangan terhadap isi ajaran itu. Oleh karena itu, gerakan kaum salafi memiliki semangat untuk melakukan gerakan pemurnian (purifikasi) terhadap ajaran yang telah mengalami percampuran. Gerakan kaum salafi menekankan adanya pembersihan (*tasfiyah*) dan pendidikan (*tarbiyah*) dengan ajaran yang benar. Melakukan *tasfiyah* dengan melihat kembali dan mengevaluasi ajaran yang telah menyimpang. Pembersihan itu dilakukan dengan melakukan koreksi dan kritik terhadap berbagai ajaran yang tidak jelas

---

<sup>9</sup>M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2009), 64.

sumbernya. Melakukan *tarbiyah* dengan mendidik generasi Islam dengan ajaran Islam yang telah dibersihkan dari berbagai penyimpangan.<sup>10</sup>

Purifikasi ajaran Islam juga sering disebut dengan istilah salafiyah. Secara terminologi, salafiyah adalah sebagai khazanah ilmu yang bersumber dari pemahaman secara mendalam terhadap ajaran *salafus shalih*. Dengan demikian, salafiyah mengacu pada metodologi berpikir kembali pada sumber pemikiran Islam yaitu al-Qur'an, kehidupan Nabi Muhammad SAW (Sunnah atau Hadits) dan generasi awal umat Islam.<sup>11</sup> John L. Esposito mengklasifikasikan salafiyah menjadi tiga kategori, antara lain:<sup>12</sup>

*Pertama*, salafiyah klasik yang dipelopori oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal (780-855). Secara substansial terfokus pada prinsip: keutamaan teks wahyu di atas akal bahwa tidak ada kontradiksi antara akal dan al-Qur'an.

*Kedua*, salafiyah pra-modern yang dikomandani oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-1792) yakni pemikiran yang berkeinginan memurnikan semenanjung Arab dan praktek non Islam serta membangun negara Islam yang meneladani negara yang didirikan Nabi. Selain itu, titik tekan gerakan Muhammad Ibn Abdul Wahab memiliki karakter khusus memerangi segala bentuk syirik dan khurafat, menyerukan kemurnian

---

<sup>10</sup>Slamet Muliono R, "Politik dalam Perspektif Kaum Salafi"... , 154.

<sup>11</sup>Muhammad Sa'i, *Gerakan Dakwah Salafiyah: Konflik Ideologis dan Sosial di Lombok Barat* (2006), 100.

<sup>12</sup>John L. Esposito, *The Oxford History of Islam* (New York: Oxford University Press, 1999), 291.

tauhid, melindungi tauhid dari segala noda, serta memerangi *bid'ah*.<sup>13</sup> Muhammad Ibn Abdul Wahab berusaha membersihkan Islam dengan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana yang dianut dan dipraktekkan pada masa tiga generasi awal.

*Ketiga*, salafiyah modern yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al Afghani (1839-1892), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935). Untuk mengembalikan Islam dalam bentuk murni dan reformasi moral, budaya dan politik muslim. Jamaluddin Al Afghani mengatakan kemurnian Islam terletak pada masa para sahabat. Muhammad Abduh berpendapat khilafah Usmani harus tetap dijaga untuk persatuan umat Islam dan menekankan revolusi pendidikan. Rasyid Ridha memandang khilafah Usmani tetap ditegakkan dan dikembangkan dengan syari'at.

Istilah *salaf* digunakan untuk menyebut para ulama sesudah tiga generasi awal Islam yang diberkahi dan mengikuti jalan mereka dalam keyakinan dan perilaku. Menurut pendukung kaum salafi, para ulama tersebut adalah:<sup>14</sup>

**Tabel 2.1 Daftar Ulama-Ulama Salafi**

No.	NAMA ULAMA SALAFI	TAHUN (H)
1	Abu Hanifah	150
2	Al Azwa'i	157
3	Al Tawn	161

<sup>13</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 26.

<sup>14</sup>M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal...*, 64.

4	Al Lais bin Sa'd	175
5	Malik bin Anas	179
6	Abdullah bin Al Mubarak	181
7	Sufyan bin 'Uyainah	198
8	As Safi'i	204
9	Ishaq	238
10	Ahmad Ibn Hanbal	241
11	Al Bukhari	256
12	Muslim	261
13	Abu Dawud	275
14	Ibn Taimiyah	728
15	Al Zahabi	748
16	Ibn Al Qayyim	751
17	Ibn Kasir	774
18	Muhammad Ibn Abdul Wahab	1206
19	Nasir al-Din al-Albani	1333
20	Shalih bin Fauzan Al-Fauzan	-
21	Abdul Muhsin Al-Abbad	-
22	Rabi' bin Hadi Al-Madkhali	-

### 3. Varian Kaum Salafi

Dalam tataran sejarah, kaum salafi memiliki varian pemikiran dan model gerakan. Varian itu bisa dijelaskan dengan menggunakan penjelasan konstelasi politik yang berkembang saat ini. Dalam kaum salafi, setidaknya berkembang tiga varian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Bernard Haykel, *Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad Shawkani* (Cambridge: Cambridge University, 2003), 49-50.

*Pertama, salafi jihadis.* Mereka menyerukan jihad dengan kekerasan untuk mewujudkan eksistensi politik yang berdasarkan Islam dalam bentuk kekhalifahan. Al-Qaeda merupakan contoh dari pandangan ini. Mereka digolongkan sebagai kelompok takfiri, karena mengkafirkan penguasa muslim yang tidak menjalankan hukum Islam di pemerintahannya. Kelompok ini dipengaruhi oleh Sayyid Qutb yang membagi negara menjadi dua macam, konsep negara *hakimiyyah* dan negara *jahiliyyah*.

*Kedua, salafi sururiyyah.* Kelompok yang mirip dengan kelompok pertama, aktif dalam politik, namun dengan mengambil jalan kekerasan. Kelompok ini mengambil jalur pentingnya kesadaran politik sebagaimana Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini diwakili oleh Shahwa Sururi di Yaman dan Kuwait. Abd al-Rahman Abd al-Khaliq, seorang Mesir lulusan Universitas Madinah yang memimpin Jam'iyat Ihya' al-Turath al-Islami. Dia menyatakan bahwa inilah salafi yang terorganisir (*al-salafiyyah al-tanzimiyyah*) guna mencapai kekuatan dan pengaruh politik.

*Ketiga, salafi apolitik.* Kelompok ini diidentikkan dengan Nasir al-Din al-Albani, Jamis Madkhali, dan Rabi' Madkhali. Mereka menjauhi semua bentuk politik, menjauhi jalur dan tindakan kekerasan, karena ini merupakan sumber fitnah. Mereka digolongkan sebagai salafiyah skolastik (*al-salafiyyah al-ilmiiyyah*), yang mengutamakan pemurnian Islam. Memusatkan pada pendidikan individu dengan ajaran salafiyah dan meluruskannya dengan ajaran yang benar ini. Mereka tidak peduli dengan

hiruk pikuk politik khususnya isu-isu internasional. Mereka berkeyakinan jika umat Islam peduli dengan agama yang benar dan bersih (*tafsiyah* dan *tarbiyah*), mereka akan mendatangkan kekuatan politik yang luar biasa. Mereka menekankan pentingnya patuh kepada rezim penguasa.

Sebagai sebuah gerakan keagamaan, kaum salafi memiliki ciri dan karakteristik yang membedakan dengan gerakan-gerakan Islam yang lain. Menurut Bernard Haykel, kaum salafi memiliki beberapa karakter yang unik dan berbeda dengan gerakan-gerakan Islam yang lain, antara lain:<sup>16</sup>

*Pertama*, kebanyakan salafi bukanlah aktor politik. Mereka bukanlah aktivis politik yang membentuk partai atau organisasi politik. Bahkan mereka tidak memiliki wadah dalam bentuk organisasi formal yang memiliki target politik atau kekuasaan yang hendak diraih. Tidak adanya wadah organisasi inilah yang menjadikan gerakan salafi begitu bebas bergerak.

*Kedua*, terjadinya reformasi sosial dan agama menjadi perhatian utama. Munculnya kesadaran beragama yang begitu kuat pada tingkat individu yang kemudian akan membentuk komunitas yang berkesadaran agama yang kuat. Kesadaran beragama secara individu yang begitu kuat, dalam jangka panjang akan memiliki implikasi secara tidak langsung pada politik. Oleh karena itu, kaum salafi berupaya untuk membentuk sebuah kelompok yang mendasarkan dirinya pada landasan agama (teologi). Kaum salafi menginginkan perubahan, dengan dakwah Islam, dari akar

---

<sup>16</sup>Bernard Haykel, *Revival and Reform in Islam...*, 24-37.

masyarakat yang paling bawah dan dimulai dari level individual dan transformasi personal. Harapan untuk perubahan agama dari yang kecil akan membentuk sistem yang lebih religius.

*Ketiga*, kaum salafi bisa dikenal dari cara berpakaian, perilaku agama, cara shalat dan cara berbicaranya. Hal itu sebagai wujud dari munculnya kesadaran melaksanakan perintah agama.

*Keempat*, menekankan untuk merujuk kepada al-Qur'an dan Hadith. Mereka senantiasa mengutamakan dalil yang kuat sebelum melakukan perbuatan. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Arab menjadi penekanan. Penekanan pada tauhid dalam pengkajian merupakan ciri yang menonjol dari kaum salafi. Meskipun kajian yang diberikan non politik, yakni masalah tauhid, namun pembicaraan bisa jadi menyentuh wilayah politik, misalnya membicarakan sistem politik yang dikuasai oleh pemikiran-pemikiran non Islam. Setelah kajian merupakan saat yang menarik untuk membicarakan masalah-masalah aktual, termasuk masalah politik. Namun yang menjadi kelebihanannya adalah fleksibilitas dan suasana jaringan informal yang cair itu membuat gerakan ini terhindar dari tekanan-tekanan dari luar.

*Kelima*, terbatasnya hierarki dalam memahami ajaran Islam. Artinya kaum salafi dalam mencari dasar-dasar agama untuk memperteguh keyakinan mereka, tanpa melewati hierarki yang begitu rumit. Mereka bisa memperoleh sumber langsung secara tekstual tanpa harus melewati beberapa hierarki personal yang panjang. Disinilah mereka memangkas

sekian banyak lapisan otoritas ketika memahami sebuah teks, dan inilah yang membedakan dengan tradisi muslim yang lain, sehingga penafsiran itu lebih terbuka dan demokratik.

*Keenam*, tidak dibatasi oleh wilayah dan pula tidak fundamentalis. Tidak dibatasinya wilayah merupakan daya tarik tersendiri bagi mayoritas masyarakat. Bahkan sikap moderat dan tidak identik dengan pemikiran kalangan fundamentalis, semakin memperkuat daya tarik banyak pihak. Oleh karena itu, gerakan kaum salafi melintas batas dunia dan berkembang dimanapun sebagai gerakan transnasional.

*Ketujuh*, senantiasa mendasarkan segala perilaku dan pandangan dengan merujuk pada teks yang bersumber dari wahyu, al-Qur'an dan al-Hadith. Contoh empiris, mereka begitu taat terhadap pemerintah dan tidak pernah melakukan kritik secara terbuka. Hal ini tentu berbeda dengan gerakan fundamentalis yang lain (seperti salafi jihadis) yang melakukan kritik secara terbuka, dan bahkan mengkafirkannya ketika pemerintah tidak menjalankan hukum Allah. Menurut pandangan mereka, bahwa melakukan perubahan membutuhkan proses.

#### 4. Sejarah Kaum Salafi Indonesia

Persentuhan awal aktivis gerakan salafi di Indonesia dengan pemikiran salafiyah terjadi pada tahun 1980-an bersamaan dengan dibukanya Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) di Jakarta, kemudian berubah nama menjadi LIPIA (Lembaga Ilmu Islam dan Sastra

Arab) yang memberikan sarana untuk mengenal dan mendalami pemikiran-pemikiran para ulama-ulama salafi. LIPIA adalah cabang dari Universitas Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Awal tahun 1980 Imam Muhammad Ibn Saud University telah memiliki cabang di Djibouti dan Mauritania kemudian memutuskan membuka cabang ketiga di Indonesia.<sup>17</sup>

Upaya membuka cabang di Indonesia diawali dengan datangnya Syekh Abdul Aziz Abdullah Al Ammar ke Jakarta. Syekh Abdul Aziz Abdullah Al Ammar merupakan murid dari Syekh Abdullah bin Bazz yang merupakan tokoh penting salafi di seluruh dunia. Oleh Abdullah bin Bazz, Abdul Aziz disuruh bertemu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir menyambut baik rencana pendirian lembaga tersebut dan bersedia menjadi mediator dengan pemerintah. Selanjutnya, Natsir dan DDII memegang peran penting dalam rekrutmen mahasiswa-mahasiswa baru. Sejak berdirinya lembaga ini, sebagian besar mahasiswa di LIPIA berasal dari lembaga pendidikan yang memiliki jaringan dengan DDII, misalnya PERSIS dan Muhammadiyah<sup>18</sup>

Lembaga baru ini mengikuti kurikulum lembaga induknya dan para pengajarnya merupakan ulama-ulama salafi yang dikirim dari Saudi Arabia. Jaminan beasiswa yang besar mencakup buku, tempat tinggal dan kebutuhan membuat lembaga ini banyak diminati bahkan terdapat sejumlah mahasiswa melanjutkan studinya di program Master dan Doktor di Riyadh. Lulusan pertama lembaga ini adalah Abdul Hakim Abdat,

---

<sup>17</sup>M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal...*, 102.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 104.

Yazid Jawas, Faridh Okbah, Ainul Harits, Abu Bakar M. Altway, Ja'far Umar Thalib, dan Yusuf Usman Baisa.<sup>19</sup>

Selain menerima pengajaran di kampus, para mahasiswa mendapat materi kesalafian yang diselenggarakan di asrama. Kelompok diskusi dirasakan lebih efektif karena bisa mengontrol langsung perilaku, ucapan, dan bahan bacaan para mahasiswa. Jika mahasiswa dianggap menyimpang dari ajaran salafi baik tindakan, pemikiran maupun buku-buku yang dibaca, senior salafi langsung menegur dan meluruskan. Pembentukan keyakinan, pandangan, sikap, dan tindakan ajaran salafi menjadi orientasi utama. Artinya mahasiswa ditekankan untuk memahami, menghafal, dan menghayati materi kuliah yang berbasis paham salafi. Tidak ada kesempatan menyangkal ajaran utama salafi khususnya soal aqidah (teologi).<sup>20</sup>

Gerakan salafi telah tumbuh menjadi gerakan sosial dalam perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Pasca Orde Baru runtuh, gerakan salafi menggeliat kurang lebih dua tahun (2000-2002). Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah (FKAWJ). Forum ini memobilisasi massa dari Laskar Jihad. Laskar Jihad berperan penting dalam perkembangan salafi di Indonesia. Laskar Jihad mendapat banyak dukungan dari masyarakat muslim Indonesia sebagai relawan untuk berjihad di Ambon dan Maluku. Tetapi,

---

<sup>19</sup>M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal...*, 104

<sup>20</sup>*Ibid.*, 105.

Laskar Jihad hanya bertahan dua tahun karena dibubarkan sehingga para relawan jihad kembali ke daerah asal masing-masing.<sup>21</sup>

Ja'far Umar Thalib menjadi perhatian publik ketika mendirikan Laskar Jihad, sebuah kelompok yang beranggotakan para pemuda untuk *jihad fi sabilillah* ke Maluku dan Poso. Laskar Jihad bergerak di bawah naungan Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal Jama'ah (FKAWJ) yang didirikan di Solo, 12 Februari 1998. FKAWJ dibentuk sebagai wujud keprihatinan lemahnya pemahaman umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam. Ketika terjadi konflik di Maluku dan Poso, FKAWJ kemudian berperan sebagai payung mobilisasi masyarakat untuk berjihad ke daerah konflik tersebut melalui pembentukan Laskar Jihad.<sup>22</sup>

Laskar Jihad menarik perhatian publik ketika mengadakan Tabligh Akbar pada 6 April 2000 di Stadion Senayan Jakarta. Tabligh Akbar ini dihadiri sekitar 10.000 orang yang didominasi oleh para pemuda. Dalam Tabligh Akbar ini, secara terbuka mengungkapkan adanya pembantaian massal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada Muslim Maluku. Ja'far Umar Thalib menyerukan untuk berjihad membantu saudara muslim di Maluku. Untuk melegitimasi tindakan tersebut, dengan meminta fatwa kepada sejumlah tokoh Timur Tengah, seperti; Abd Al Razzaq Ibn Abd Al Muhsin Al Abbad, Muqbil bin Hadi Al Wadi'i, Rabi' bin Hadi Al Madkhali, Salih As Suhaimiy, Ahmad Yahya Ibn Muhammad An Najmi

---

<sup>21</sup>Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad* (2007), 6.

<sup>22</sup>Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2008), 86-87.

dan Wahid Al Jabiri. Para ulama salafi tersebut mengeluarkan fatwa wajibnya berjihad ke Maluku.<sup>23</sup>

Selain terlibat dalam konflik Maluku, Laskar Jihad juga mengirim 700 relawan ke Poso, Sulawesi Tengah. Laskar Jihad memandang telah terjadi pembantaian massal yang dilakukan penduduk lokal non-muslim kepada para pendatang yang mayoritas muslim. Di balik itu, Laskar Jihad menilai ada konspirasi Zionis dan Kristian Internasional dalam konflik Poso. Selain di Poso, Laskar Jihad berusaha untuk terlibat dalam konflik di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan konflik Papua (Kelompok Papua Merdeka). Namun, usaha ini mengalami kegagalan karena penduduk lokal menolak intervensi orang luar.<sup>24</sup>

Keterlibatan Laskar Jihad dalam berbagai konflik komunal di Indonesia, di satu sisi telah menunjukkan gerakan salafi sebagai gerakan sosial Indonesia yang agresif dan berhasil memobilisasi massa. Di sisi lain, munculnya Laskar Jihad menimbulkan ketegangan antara kaum salafi sendiri bahkan antar gerakan Islam lainnya. Sebagian masyarakat menuduh Laskar Jihad sebagai agen jaringan Al Qaeda. Ada juga yang beranggapan bahwa Laskar Jihad adalah kepanjangan tangan yang dimanfaatkan dan bekerja untuk elit pemerintah. Hal ini kemudian menjadi tekanan tersendiri bagi Laskar Jihad.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad...*, 117-118.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 218.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 236.

Tekanan yang serius adalah berubahnya kebijakan pemerintah dalam menangani konflik. Pemerintah berusaha menangani konflik dengan mengirim tentara dan tokoh politik ke daerah konflik. Kebijakan tersebut membuat lahan kerja Laskar Jihad diambil alih oleh pemerintah. Masa pemerintahan Megawati menekankan cara-cara diplomatik dalam mengatasi konflik di Ambon dan Poso serta peringatan agar kelompok para-militer yang terlibat konflik dibubarkan dan membawa persoalan ke meja perundingan.<sup>26</sup>

Adanya tekanan tersebut berakibat peranan Laskar Jihad semakin berkurang dan memaksa keluar dari daerah konflik sehingga mengakibatkan Laskar Jihad kehilangan peran pentingnya dalam masyarakat. Pada tanggal 12 Oktober 2002, Laskar Jihad dibubarkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Rabi' bin Hadi Al Madkhali (tokoh salafi Yaman), panutan aktivis salafi di Indonesia. Alasan pembubaran karena Laskar Jihad menyimpang dari tujuan semula untuk berjihad membela kaum muslimin di Maluku. Selain itu, Ja'far Umar Thalib menambahkan bahwa situasi di Maluku telah pulih sehingga Laskar Jihad tidak diperlukan lagi dalam penanganan konflik.<sup>27</sup>

Peristiwa tersebut adalah tanda-tanda perpecahan Laskar Jihad. Beberapa tokoh FKAWJ mulai merasakan langkah Ja'far Umar Thalib telah menyimpang dari tujuan semula, seperti: Abu Munzir Zul Akmal dan Abu Muhammad Zulkarnain. Kekecewaan bertambah ketika Ja'far Umar

---

<sup>26</sup>Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad...*, 237.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 237.

Thalib muncul di televisi (TV) bersama politisi dan pemimpin organisasi Islam yang berdakwah secara *hizbiyyah*. Walaupun awalnya Ja'far Umar Thalib berusaha mempertahankan Laskar Jihad. Namun beberapa hari setelah peledakan bom Bali, Ja'far Umar Thalib merubah pendiriannya dan mengumumkan pembubaran Laskar Jihad.<sup>28</sup>

## B. Teori Gerakan Keagamaan

Pembahasan mengenai potret gerakan keagamaan (Islam) digunakan sebagai respon ideologi Barat dan respon terhadap modernisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok Islam dalam merespon munculnya hal-hal yang berasal dari Barat memiliki bermacam-macam bentuk. Sedangkan tujuan penggunaan teori gerakan keagamaan untuk mengidentifikasi gerakan kaum salafi yang merupakan salah satu kelompok Islam. Gerakan keagamaan khususnya Islam tersebut oleh William E Shepard dalam tulisannya "*Islam and Ideology: Toward A Typology*" diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

*Pertama*, sekularisme Islam adalah sebuah pandangan yang menempatkan agama (Islam) sebagai urusan pribadi dan harus berada di luar area publik. Artinya ada pembagian wilayah antara agama dan negara (politik). Namun sekularisme ada varian, ekstrem dan moderat. Kelompok pertama (ekstrem) tidak mengakui keberadaan agama sama sekali, dan

---

<sup>28</sup>Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad...*, 238.

<sup>29</sup>William E. Shepard, *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, ed Syafiq Mughni (Canada: Coundrum Press, 1988), 416-418.

menutup ruang tumbuhnya agama. Sedangkan kelompok kedua (moderat) masih mengakui eksistensi agama dan memberikan ruang aktivitas keagamaan, namun tidak memasukkannya ke dalam ruang publik.

*Kedua*, Islam radikal tergolong dan disebut sebagai gerakan fundamentalisme yang membenarkan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Kaum fundamentalis berpandangan tidak berbeda dengan kaum modernisme Islam bahwa Islam mengatur kehidupan privat dan publik secara integratif dan menyeluruh, Islam begitu fleksibel dan memberi ruang bagi pintu ijtihad namun sesuatu yang tidak berasal dari Islam harus dieliminasi. Kaum fundamentalis menekankan pentingnya penerapan syari'at Islam dalam kehidupan bernegara da bahkan membenarkan tindakan kekerasan guna mencapai tujuan mereka.

*Ketiga*, modernisme Islam mengakui bahwa Islam tidak hanya memberikan ruang bagi Islam untuk berkiprah pada ruang publik, tetapi Islam memiliki konsep untuk mengatur kehidupan baik individu maupun publik. Mereka mempergunakan Al Qur'an dan Hadits sebagai rujukan, namun mereka bersifat fleksibel. Artinya di satu sisi mengakui kebenaran yang terkandung dalam dua sumber pokok rujukan umat Islam, namun di sisi lain memberikan ruang dalam menafsirkannya dengan mengadopsi pendekatan Barat.

*Keempat*, tradisionalisme Islam muncul untuk merespon kelompok modernis (modernisme Islam) yang dianggap melakukan duplikasi peradaban Barat. Pemikiran dan perilaku yang Nampak dari kelompok modernis sangat

membahayakan eksistensi agama. Akar dari semua itu, sekali lagi disebabkan oleh Barat. Barat dianggap sebagai kelompok orang yang dibenci oleh Tuhan dan memusuhi Islam (kafir). Dalam sikap beragama, mereka begitu reaktif terhadap modernisasi. Mereka begitu berpegang teguh terhadap tradisi Islam, namun pada saat yang sama mereka bisa berinteraksi dengan tradisi lokal.

*Kelima*, neo-tradisionalisme Islam merupakan transisi dari masyarakat Islam sekuler, modernisme, dan radikal. Kaum neo-tradisionalis menerima pentingnya teknologi modernisasi namun selektif terhadapnya, khususnya nilai-nilai “progres” yang terkandung dalam modernisasi itu. Mereka berobsesi untuk menerapkan Islam otentik, Islam yang murni dari tradisi Islam yang terbebas berbagai campuran tradisi lokal sebagaimana dilakukan kaum tradisionalis.

Klasifikasi William E. Shepard di atas bertujuan untuk mengklasifikasikan kaum salafi masuk dalam kategori gerakan Islam yang mana. Kaum salafi begitu selektif terhadap kultur yang berkembang di masyarakat guna mewujudkan tatanan yang mereka diinginkan. Meski tergolong kelompok fundamentalis, karena mengajak kembali kepada ajaran agama yang fundamental, kaum salafi berbeda dengan gerakan-gerakan dakwah yang lain. Kaum salafi termasuk ke dalam gerakan neo-tradisionalisme karena mengajak kembali kepada kemurnian ajaran, yakni ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadith.

### C. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Pengertian pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup> Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Berkaitan dengan ini, Sahid Gatara menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.<sup>31</sup>

Dalam sistem pemilihan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kemudian menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam buku karangan Efriza yang berjudul “*Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*”,

---

<sup>30</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>31</sup>Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008), 207.

pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.<sup>32</sup>

Selain itu, pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima (5) tahun sekali merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.<sup>34</sup>

Sedangkan tujuan diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Menurut Inu Kencana Syafie, tujuan pemilu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Efriza dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa, 2006), 298.

<sup>33</sup>*Ibid.*, 299.

<sup>34</sup>*Ibid.*, 300.

<sup>35</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 128.

*Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. *Kedua*, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. *Ketiga*, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalangkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Pemilu juga sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat untuk mendukung atau tidak mendukung pemerintahan dengan cara memberikan suaranya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi suatu negara karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Selain itu pemilu juga bisa digunakan sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi serta sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

#### **D. Konsep Demokrasi**

Demokrasi secara etimologi bersal dari kata '*demos*' yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan '*cratein*' yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi '*demos-cratein*' atau demokrasi adalah keadaan negara

dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Di negara-negara Barat keadaan ini timbul setelah merasakan sulit dan pahitnya pemerintahan bila dipegang oleh satu orang atau satu golongan tertentu, sehingga kekuasaan tersebut harus dipisah ke dalam beberapa lembaga sebagaimana dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Montesquieu, John Locke, Gabriel Almond, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Pendefinisian konsep demokrasi oleh Masdar Hilmy dalam analisis kerangka konseptual bukunya "*Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*" diklasifikasikan menjadi dua yaitu demokrasi institusional atau demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.<sup>37</sup>

*Pertama*, demokrasi institusional atau demokrasi prosedural. Dalam menjelaskan demokrasi prosedural, Masdar Hilmy menyatakan pemerintahan dengan kriteria sebagai berikut; kompetisi yang bebas dan periodik sekurang-kurangnya dua calon untuk membuat keputusan secara efektif dengan hasil akhir pemerintahan yang damai; keberadaan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam pemilihan umum; terdapat jaminan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, semacam kebebasan berekspresi, kebebasan media dan kebebasan untuk bergabung dan mendirikan partai politik; pemimpin dianggap akuntabel secara publik selama memegang kantor pemerintahan maka dibutuhkan sarana memecat pemimpin jika melanggar hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik...*, 129.

<sup>37</sup>Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan, Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 27.

<sup>38</sup>*Ibid.*, 28-29.

*Kedua*, demokrasi juga melingkupi nilai-nilai substantif seperti kemerdekaan (*liberty*), kebebasan (*freedom*), kesederajatan (*equality*), keadilan (*justice*), toleransi dan penegakan hukum. Kemerdekaan dan kesederajatan menjadi kunci dasar dalam demokrasi. Kesederajatan merupakan pijakan moral dan praktis dari kemerdekaan.<sup>39</sup>

Sedangkan terkait konsep demokrasi dalam Islam di Indonesia, menurut Masdar Hilmy masih menimbulkan perdebatan yang bersifat multiversi sehingga muncul dua aliran dalam Islam. *Pertama*, kaum Islamis (fundamentalis) yaitu kaum yang menolak demokrasi (isu-isu pluralism, gender, dll) karena segala sesuatu harus kembali pada syari'at Islam. Demokrasi dianggap sebagai penghancur pandangan dunia muslim dan menentang konsep negara Islam (*khilafah*). *Kedua*, kaum Islam Moderat adalah kaum Islam yang menerima demokrasi karena Islam *rahmatan lil 'alamin*, Islam fleksibel dan relevan dipertemukan dimana saja.<sup>40</sup>

#### **E. Konsep Kepemimpinan**

Dalam kitab *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, Al Mawardi membahas tentang peran yang bisa dimainkan oleh negara dalam memenuhi keperluan manusia di bidang duniawi termasuk agama. Menurut Al-Mawardi dalam memilih seorang pemimpin (*khalifah*) awalnya perlu dibentuk dewan pemilih (orang yang berilmu dan memahami agama Islam). Dewan *imam (khalifah)* bertugas mengangkat salah satu dari mereka sebagai *imam*. Jabatan *imamah*

---

<sup>39</sup>Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan...*, 30.

<sup>40</sup>*Ibid.*,159.

(kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara yakni *pertama*: pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua*: penunjukan oleh *imam (khalifah)* sebelumnya. *Ketiga*: melalui turun-temurun antara *imam (khalifah)* kepada keturunannya (anakny).<sup>41</sup>

Al Mawardi juga menegaskan bahwa pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian sosial dalam suatu negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik secara rasional maupun *syara'*. Secara rasional, tidak mungkin ada suatu negara atau daerah tanpa pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara atau daerah. Sebab jika demikian, maka masyarakat akan hidup dalam hukum rimba karena tanpa ada pihak yang mencegah terjadinya kezhaliman dan tidak ada pihak yang akan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan.<sup>42</sup>

Secara *syara'*, kewajiban mengangkat pemimpin diketahui dari kesepakatan sahabat dan *tabi'in* karena para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka bergegas membaiat Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menjadi *khalifah* begitu juga pada masa-masa *tabi'in* mereka semua tidak pernah membiarkan kepemimpinan kosong. Menurut *syara'*, *imam* (kepala negara) adalah pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah duniawi dengan aturan-aturan agama, menempatkan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya dan menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.

---

<sup>41</sup>Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 6.

<sup>42</sup>*Ibid.*

Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam Al Sulthaniyah* menyatakan bahwa mengangkat pimpinan adalah *fardu kifayah*, jika dalam suatu negara belum ada presiden maka dibentuklah dulu dewan pemilih lalu ditentukan kandidat presiden. Orang-orang yang menjabat dewan pemilih harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:<sup>43</sup>

- a. Adil dan segala aspeknya.
- b. Memiliki ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mengetahui orang-orang yang layak dan berhak menjadi presiden.
- c. Memiliki kecerdasan, pandangan luas serta kebijaksanaan sehingga mampu memilih yang terbaik dari beberapa kandidat yang ada.

Sedangkan untuk kandidat presiden, menurut Al Mawardi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:<sup>44</sup>

1. Adil.
2. Berilmu pengetahuan sehingga bisa membuat keputusan yang tepat terhadap berbagai masalah yang timbul.
3. Sehat inderanya baik penglihatan, pendengaran, maupun lisannya agar mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.
4. Anggota tubuhnya normal dan tidak cacat, karena jika cacat maka hal itu akan mengganggu atau menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.
5. Mempunyai kecerdasan yang membuat dirinya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik.

---

<sup>43</sup>Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah...*, 5.

<sup>44</sup>*Ibid.*

6. Memiliki keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dan mampu menghadapi musuh.

#### **F. Kepemimpinan Menurut Kaum Salafi**

Pandangan kaum salafi tentang kepemimpinan dipengaruhi oleh beragamnya respon gerakan Islam terhadap proses pemilihan pemimpin yang mengadopsi sistem demokrasi. Pada saat yang sama Islam dipercayai memiliki konsep dan mekanisme sendiri dalam menentukan pemimpin karena Islam adalah agama terbaik yang meliputi semua yang bukan saja mengurus persoalan-persoalan dunia saja tetapi juga akhirat. Konsep Islam itu dianggap lebih baik dan terjamin untuk melahirkan pemimpin yang sesuai dan bertanggung jawab, baik untuk kepentingan negara dan bangsa, maupun agama Islam itu sendiri.<sup>45</sup>

Dalam memilih pemimpin, pandangan kaum salafi lebih banyak memiliki kemiripan dengan pendapat Al Mawardi dalam menentukan seorang pemimpin. Al Mawardi mengatakan bahwa untuk melahirkan seorang pemimpin, dibutuhkan dua komponen, yakni dewan pemilih dengan persyaratannya, dan dewan imam dengan segala kriterianya. Dewan Pemilih bertugas memilih imam (*khalifah*) bagi umat. Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (*khalifah*).<sup>46</sup>

Kaum salafi menekankan pentingnya taat kepada pemimpin, selama pemimpin itu memerintahkan hal yang baik dan melarang yang buruk. Namun kaum salafi menyatakan boleh tidak taat kepada pemimpin yang

---

<sup>45</sup>Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan...*, 34.

<sup>46</sup>Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah...*, 6.

memerintahkannya kemaksiatan. Kaum salafi mengakui hasil dari pemilihan pemimpin yang menggunakan sistem demokrasi walaupun mereka tidak mengikuti proses tersebut. Mereka juga tidak melakukan pembangkangan terhadap pemimpin sebagai produk dari sistem yang tidak berasal dari Islam.<sup>47</sup>

Dalam pandangan kaum salafi, apabila seorang pemimpin yang memakai hukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinan bahwa hukum yang dia terapkan lebih baik daripada hukum Allah, maka pemimpin yang demikian adalah pemimpin yang kafir. Tetapi apabila seorang pemimpin yang menerapkan hukum selain hukum Allah, namun di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa hukum Allah lebih baik, tetapi karena suatu hal maka dia tidak menerapkan hukum Allah. Maka dengan kondisi yang demikian, dia tetap merupakan seorang muslim.<sup>48</sup>

Kaum salafi memandang pentingnya ilmu dan hikmah dalam menyampaikan sesuatu kepada pemimpin, sehingga perubahan yang lebih baik akan muncul. Menurut kaum salafi, dalam memperbaiki pemimpin bukan melakukan kritik secara terbuka, tetapi dilakukan secara tertutup, tersembunyi, atau tanpa diketahui orang lain. Karena seorang pemimpin memiliki kewibawaan. Dakwah Islam adalah mengubah orang bukan mengubah sistem. Sebagaimana dikatakan Abdul Hakim bin Amir Abad bahwa dakwah para

---

<sup>47</sup>Slamet Muliono, "Makna Takfir Pemimpin bagi Kaum Salafi", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol.01, No.02 (Desember 2011), 254.

<sup>48</sup>*Ibid.*, 249.

rasul adalah mengubah orang, bukan mengubah sistem. Karena jika sistem yang diserang atau ingin diubah, maka akan timbul perlawanan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, 257.